



Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh - Indonesia



RENSTRA RSUDZA TAHUN 2023 - 2026



Memberi Lebih Dari Yang Diharapkan



Visit
Jl. Tgk. Chud Beureueh No. 108
Banda Aceh, Indonesia



Twitter
RSUD dr. Zainoel Abidin



Instagram
rsudza.aceh



Facebook
Rumah Aceh



Email
rsudza@rsudza.aceh.go.id



Website
rsudza.aceh.go.id

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin beralamat di Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh Nomor 118 Banda Aceh, berdiri pada tanggal 22 Februari 1979 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 551/MENKES/SK/2F/1979 yang menetapkan RSUD dr. Zainoel Abidin sebagai rumah sakit kelas C. Selanjutnya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 445/173/1979 tanggal 7 Mei 1979 menetapkan RSUD dr. Zainoel Abidin sebagai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Pada saat didirikannya Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, Menteri Kesehatan RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor 233/MENKES/SK/VI/1983 tanggal 11 Juni 1983 tentang penetapan peningkatan kelas rumah sakit kelas C menjadi rumah sakit kelas B Pendidikan dan rumah sakit rujukan untuk Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dalam perkembangannya RSUD dr. Zainoel Abidin terus melakukan pembenahan secara bertahap diantaranya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 8 Tahun 1997 tanggal 17 November 1997 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 153/MENKES/SK/II/1998 tentang Persetujuan Rumah Sakit Umum Daerah yang digunakan sebagai tempat pendidikan calon dokter dan dokter spesialis.

Pada tanggal 27 Agustus 2001 melalui Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2001 ditetapkan perubahan RSUD dr. Zainoel Abidin dari UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) menjadi LTD (Lembaga Teknis Daerah) dalam bentuk “Badan Pelayanan Kesehatan (BPK)” yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPK RSUD dr. Zainoel Abidin disempurnakan kembali melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2003. Dalam qanun ini dibentuk dua wakil direktur, yaitu Wakil Direktur Pelayanan, Penunjang dan Pelatihan serta Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan. Qanun ini juga menjelaskan tentang tugas dan fungsi rumah sakit yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan bermutu kepada masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh

Tabel 2. 11 TC-24B Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin

URAIAN	Anggaran Tahun	Anggaran Revisi	Realisasi	Rasio
	2021	2021	2021	2021
	(1)	(1)	(1)	(1)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	656.122.196.532,00	738.287.517.209,00	719.962.869.101,02	97,52%
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	139.076.801.486,00	181.183.443.301,00	174.917.436.874,00	96,54%
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	2.472.440.000,00	2.472.440.000,00	2.205.665.344,00	89,21%
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	538.465.180,00	2.561.665.180,00	782.936.123,00	30,56%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.990.000,00	2.103.190.000,00	621.429.000,00	29,55%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	458.475.180,00	458.475.180,00	161.507.123,00	35,23%
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.218.580.000,00	81,24%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.218.580.000,00	81,24%
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	37.254.961.366,00	38.006.343.866,00	32.530.411.356,00	85,59%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	10.448.354.600,00	10.448.354.600,00	10.087.957.771,00	96,55%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.806.606.766,00	27.557.989.266,00	22.442.453.585,00	81,44%
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.279.528.500,00	1.279.528.500,00	1.081.975.753,00	84,56%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.279.528.500,00	1.279.528.500,00	1.081.975.753,00	84,56%
PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	474.000.000.000,00	511.284.096.362,00	507.225.863.651,02	99,21%
Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan Blud	474.000.000.000,00	511.284.096.362,00	507.225.863.651,02	99,21%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	252.574.594.369,00	297.453.211.657,00	243.777.838.634,00	81,96%
PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	236.011.334.369,00	245.213.287.657,00	200.527.053.344,00	81,78%
Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana Dan Prasarana Pendukungnya	188.200.560.524,00	188.200.560.524,00	170.360.431.015,00	90,52%
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rumah Sakit	8.279.520.000,00	8.279.520.000,00	3.276.708.000,00	39,58%
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	11.039.294.766,00	20.241.248.054,00	18.785.018.442,00	92,81%
Pengadaan Sarana Di Fasilitas Layanan Kesehatan	20.280.248.929,00	20.280.248.929,00	-	0,00%
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	8.211.710.150,00	8.211.710.150,00	8.104.895.887,00	98,70%
PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	16.563.260.000,00	52.239.924.000,00	43.250.785.290,00	82,79%
Operasioanal Pelayanan Rumah Sakit	16.563.260.000,00	52.239.924.000,00	43.250.785.290,00	82,79%
	908.696.790.901,00	1.035.740.728.866,00	963.740.707.735,02	93,05%

Dari tabel diatas didapatkan bahwa terdapat 2 tabel yang berbeda untuk target dan realisasi tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dan khusus tahun 2021 hal ini karena terdapat perbedaan kode rekening.

Trend rasio realisasi dan anggaran tahun 2017 untuk Belanja Tidak langsung yang berupa Gaji ASN terjadi fluktuatif dimana tahun 2017 95,74% lalu naik menjadi 101,89 di tahun 2018 kemudian turun ke 97,96% di tahun 2019 dan turun lagi menjadi 90,87% di tahun 2020.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun dari tahun 2023-2026. Perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang disajikan dibawah ini merupakan kapasitas keuangan yang bersifat indikatif, dalam artian tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terkini pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Kerangka pendanaan pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 sebagaimana telah diuraikan di atas memberikan informasi tentang kemampuan pemerintah Aceh untuk membiayai seluruh belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, dan Belanja Tidak Terduga. Seluruh belanja tersebut dilaksanakan melalui program pembangunan berdasarkan bidang urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku penanggung jawab terhadap tercapainya program, indikator, dan target kinerja outcome

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi		
				Program	Pada Tahun	Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Kondisi Kinerja pada		SKPA			
				(Outcome)	Awal									akhir periode RSB		Perangggung			
				dan Kegiatan	Perencanaan									SKPA		Jawab			
				(Output)		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21		
Tervujudnya kepuasan stakeholder	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan medis dan pelayanan penunjang rumah sakit	1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Terpenuhiya Operasional rumah sakit	92,05%	95%	144.679.610.885	95%	144.015.868.489	95%	72.823.232.028	95%	17.525.092.917	95%	379.043.804.319	RSUDZA	B. Aceh
		1	02	02	1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang disediakan, dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	97	153	144.275.070.885	180	143.611.328.489	220	72.418.692.028	234	17.120.552.917	377.425.644.319		
		1	02	02	1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dok	12 Dok	404.540.000	12 Dok	404.540.000	12 Dok	404.540.000	12 Dok	404.540.000	1.618.160.000		
TOTAL								890.952.203.601		890.288.461.205		839.095.824.744		793.797.685.633		3.414.134.175.183			